

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bakhrul Amal, 2018, *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Bernard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Pustaka Margaretha.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Henry Campbell, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group, West Publishing Company.
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT.Refika Aditama,
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Lawrence M. Freidman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspektive*, New York, Russel Sage Foundation.
- Lawrence M. Freidman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) Cetakan ke-1*, Jakarta, Pradinya Paramitha.
- M Hardjon Philipus, 1993, *Masalah Pertanahan dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Surabaya, Yuridika FH UNAIR.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi ke-13*, Jakarta, Kencana.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Teguh Prastyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media.

W.Friedman,1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Zakaria Bangun, 2008 *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan,Bina Media Perintis.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 *tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 *tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 *tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*

Peraturan Tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 *tentang Penganggulangan Anarki*

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 *tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 *tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311)

C. JURNAL

- Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.1, 2012, hlm.160 <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>
- Asmak ul Hosnah, *Diskresi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4(2), 2019, hlm.144 <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.480>
- Fence M. Wantu, *Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19, No.3, 2007, hlm.388
- Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Redbruch Dalam Putusan PKPU PTB*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No.3 (2021), hlm.329.
- Herry Susilowati, Noor Tri Hastuti, *Kedudukan Hierarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menangani Kerusuhan Massa dan Hubungannya dengan HAM*, Jurnal Perspektif, Vol.16, No.1, 2011, hlm.7 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.65>
- Ni Ketut Sari Andyani , *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol.7, No.2, 2021, hlm.142 <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Vol.7 No. 3,1991, hlm.102.
- Idil Akbar, *Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial*, Jurnal Wacana Politik, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 109 <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>
- Joko Rudiantoro, *Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.6, 2014, hlm.497
- Legowo Saputro, *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.21, No. 2, 2015, hlm.95 <https://doi.org/10.22146/jkn.10153>
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.2, 2017, hlm.150 <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>

- Muhammad Adam, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal JISH , Vol.3, 2017, hlm.62 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.7>
- Reza Fahlevi Kasbi, (et.al), Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menganggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Retentum, Vol.2 No.1, 2021, hlm.27
- R. Tonny Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.2, 2016, hlm.194-195.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2, Juli 2021, hlm. 217 <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>

D. LAIN-LAIN

<https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/09/kronologi-aksi-anarkis-massa-pendemo-tolak-uu-cipta-kerja-di-sekitar-gedung-grahadi-surabaya> diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 20.32.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi-sejarah-dan-pelaksanaannya-di-indonesia-lt61b739dbb5bf8/> yang diakses pada pukul 21.28 wib.

Wawancara langsung oleh Bapak Imam Pauji selaku Kepala Satuan Samapta di Polrestabes Surabaya, pada Selasa, 22 November 2022, pukul 11.20 WIB.

Wawancara langsung oleh Bapak Imam Pauji selaku Kepala Satuan Samapta di Polrestabes Surabaya, pada Selasa, 14 Februari 2023, pukul 09.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Imam Pauji selaku Kepala Satuan Samapta di Polrestabes Surabaya, pada Kamis, 16 Februari 2023, melalui whatsapp chat pada pukul 08.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Teguh Santoso selaku Kepala Satuan Samapta di Polrestabes Surabaya, pada Kamis, 11 Mei 2023 pukul 13.20 WIB.